



## SOSIALISASI DAN PENGENALAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERGURUAN RAKYAT

### AUTHOR

<sup>1)</sup>Dadan Sundara, <sup>2)</sup>Dyah Utami Dewi, <sup>3)</sup>Medy Desma Fatwara,  
<sup>4)</sup>Triyono Adi Tristanto

### ABSTRAK

Korupsi adalah bahaya laten yang patut diwaspadai perkembangannya dalam kehidupan bermasyarakat, utamanya di Indonesia. Sedin mungkin warga Indonesia patutnya dibekali dengan pengenalan akan jenis dan bahaya dari korupsi itu sendiri. Sekolah sebagai salah satu instansi formal Pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi bagi siswanya agar dapat memutus mata rantai perkembangan korupsi di dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar Tim PkM Dosen IBI-K57 untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berjudul "Sosialisasi dan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perguruan Rakyat". Metode yang digunakan dalam Program Pengabdian Masyarakat adalah metode pengukuran kemampuan pemahaman materi Pendidikan Antikorupsi sebelum dan sesudah penyampaian materi dan metode *student active learning* yaitu penekanan kepada proses keterlibatan pelajar secara penuh sehingga mendorong pelajar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga dan dimasyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan nilai uji sesudah penyampaian materi Pendidikan Antikorupsi yang artinya mereka dapat memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber mengenai Pendidikan Antikorupsi.

### Kata Kunci

Pendidikan Antikorupsi, *Student Active Learning*, SMK Perguruan Rakyat

### AFILIASI

Prodi, Fakultas  
Nama Institusi  
Alamat Institusi

<sup>1-4)</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi  
<sup>1-4)</sup>Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957  
<sup>1-4)</sup>Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

### KORESPONDENSI

Author  
Email

Dadan Sundara  
dadan.sundara@gmail.com

### LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pendidikan antikorupsi sejalan dengan pendidikan yang berkarakter dan humanistik karena ini merupakan proses pembentukan akhlak peserta didik, pendidikan antikorupsi dan humanistik diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam pembentukan jati diri yang jujur dan berparadigma Pancasila serta UUD 1945 sesuai dengan UU No. 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Manurung, 2012) dan pendidikan antikorupsi yang ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistic (Raras Ramadhani, 2022).

Korupsi adalah suatu tingkat kejahatan yang memberikan dampak yang sangat luar biasa dan memberikan dampak domino bagi semua aspek di Indonesia. Walaupun telah ada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan untuk memberantas korupsi di Indonesia tetapi Korupsi di Indonesia masih dianggap paling tinggi. Program Antikorupsi tidak saja di sosialisasi kepada seluruh jajaran masyarakat tetapi disampaikan melalui Pendidikan Antikorupsi mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan tingkat perguruan Tinggi.

Tim PKM menilai tidak adanya mata pelajaran khusus membahas Pendidikan Antikorupsi menjadi dasar kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perguruan Rakyat dengan berdiskusi dengan pihak sekolah terkait penerapan materi dan kegiatan sosialisasi materi tersebut. Dimana tujuan dari sosialisasi ini adalah Memberikan pemahaman dan pengenalan kepada siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) perguruan rakyat mengenai pengertian dan bahaya korupsi, pentingnya Pendidikan Antikorupsi mulai dini perilaku bagaimana perilaku Antikorupsi. Dimana pemahaman Pendidikan antikorupsi adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat dan sudah ada niat untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi (Hambali, 2020).

Pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi tanggung jawab semua masyarakat bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Dalam pemberantasan korupsi, ada tiga aspek yang dilakukan. Pertama, penindakan, kedua, pencegahan, dan ketiga, pendidikan yaitu Pendidikan korupsi ((Dwiputri et al., 2020)

## METODE PELAKSANAAN

Metode PKM yang digunakan adalah metode tes yang diberikan sebelum materi disampaikan dan sesudah materi disampaikan untuk mengetahui seberapa besar mereka dapat memahami dan menguasai materi Pendidikan Antikorupsi dan metode *student active learning* yaitu dalam kegiatan memberikan kesempatan siswa aktif dalam memberikan respons sehingga komunikasi 2 arah berjalan antara peserta dengan para narasumber. Selain untuk lebih menghasilkan komunikasi yang interaktif maka siswa dibagi dalam beberapa grup untuk dapat saling mengerjakan beberapa *games* sehingga masing-masing grup akan mendapat nilai tertinggi untuk dapat diberikan penghargaan kepada grup yang paling tinggi nilainya. Penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inaya dkk (Dwiputri et al., 2020).





**Gambar 1. Para Peserta Pelatihan Antikorupsi**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa hal yang kami dapat jabarkan berkenaan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengabdian masyarakat kami ke SMK Perguruan Rakyat.

### A. Faktor Pendorong dan Penghambat

Ada faktor yang mendorong keberhasilan program ini, namun tidak sedikit juga faktor yang menghambatnya. Faktor yang menjadi pendorong adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan PKM ini didukung sepenuhnya oleh pihak sekolah mulai jajaran Humas, para guru dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perguruan Rakyat
- 2) Antusias siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perguruan Rakyat saat menerima sosialisasi materi Pendidikan Antikorupsi dimanah mereka aktif berkomunikasi dan bisa mengikuti games yang diberikan oleh para dosen saat penyampaian materi berlangsung.

Adapun faktor penghambat adalah antara lain:

- 1) Keterbatasan waktu dengan waktu 1 hari diberikan dalam sosialisasi materi Pendidikan Antikorupsi tidak dapat semua disampaikan kepada para siswa
- 2) Perlu adanya evaluasi berkelanjutan oleh para guru khusus guru BP untuk memastikan program ini dapat diimplementasikan oleh siswa sepanjang disekolah, di keluarga dan di masyarakat.

### B. Evaluasi (Relevansi, Akseptabilitas, Hasil Guna, Ketepatan Manfaat, Partisipasi Siswa, dan Rencana Tinjauan Dampak)

Ukuran keberhasilan program PKM ini harus dilihat melalui evaluasi yang komprehensif dari berbagai aspek yaitu:

#### 1. Aspek relevansi.

Aspek ini dinilai dari relevansi antara kesesuaian bidang ilmu pelaksana program dengan program pengabdian yang dilaksanakan. Dalam aspek ini, Tim PKM semuanya berlatar belakang manajemen dan memiliki pengalaman mengampun mata kuliah Pendidikan Antikorupsi Dengan demikian, program pengabdian telah memenuhi kriteria relevansi program.

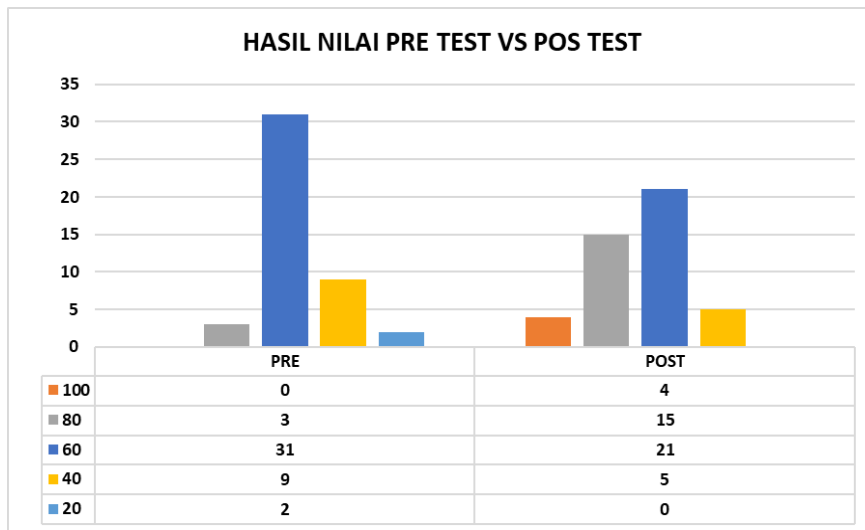


**2. Aspek Akseptabilitas**

Aspek ini dinilai dari diterima atau tidaknya program ini oleh para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perguruan Rakyat dengan aktif berdiskusi dalam grup yang sudah ditentukan dan mengikuti semua *games* yang diberikan oleh tim dosen. Selain itu sebagai ucapan atas bantuan dan diterimanya tim PKM IBI Kosgoro memberikan plakat kepada pihak SMK Perguruan Rakyat Dengan demikian dari aspek ini dapat disimpulkan bahwa program pengabdian ini telah memenuhi kriteria akseptabilitas program.

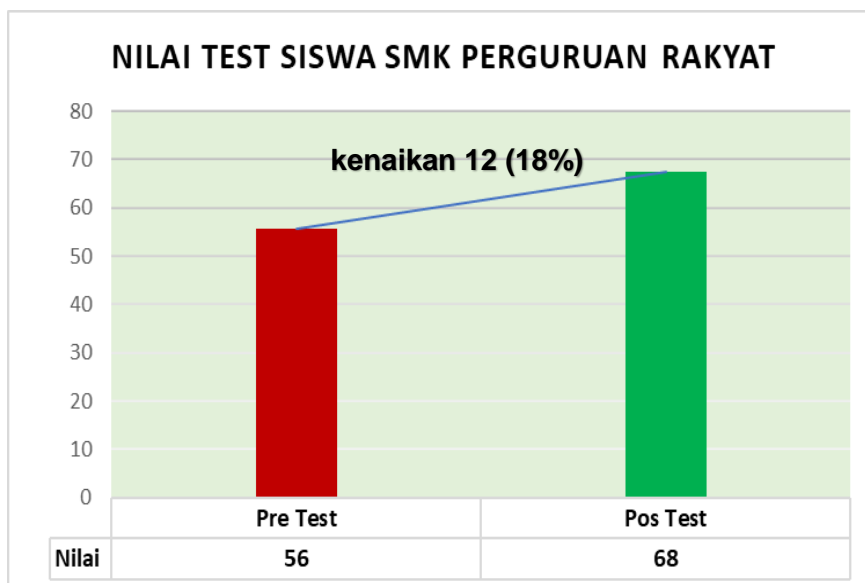
**3. Aspek Hasil Guna**

Aspek ini dinilai dari berguna tidaknya hasil dari program pengabdian bagi masyarakat. *Output* yang dihasilkan dari program ini adalah hasil *Pre Test* dan *Pos Test* menunjuk adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi Pendidikan Antikorupsi sesuai grafik di bawah ini:



**Grafik 1: Hasil Nilai**

Grafik 1 menunjukkan ada kenaikan nilai pos test dimana nilai angka 100 didapat oleh 4 siswa sebelum pada pre test tidak ada siswa yang mendapa nilai 100, siswa yang mendapatkan angka 80 meningkat dari 3 siswa menjadi 15 siswa, siswa yang mendapat nilai 60 menurun dari 31 siswa menjadi 21 siswa, siswa yang mendapat nilai 40 mengalami penurunan dari 9 siswa menjadi 5 siswa dan tidak ada siswa yang mendapat nilai 20 di pos test.



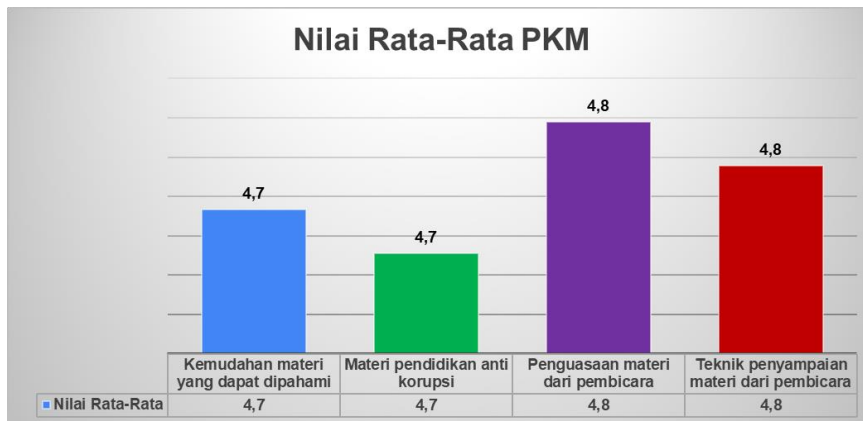
**Grafik 2: Kenaikan Nilai Test**



Dari grafik 2 di atas menunjukkan adanya kenaikan nilai rata-rata sebesar 12 poin atau kenaikan sebesar 18% dari angka sebesar 56 menjadi 68. Dengan demikian, program pengabdian telah memenuhi kriteria aspek hasil guna.

**4. Aspek Ketepatan Manfaat**

Aspek ini dievaluasi dari tepat tidaknya manfaat yang diterima oleh khalayaksasaran dari program pengabdian masyarakat yaitu para siswa SMK Perguruan Rakyat yang menerima sosialisasi materi Pendidikan Antikorupsi yang di tuangkan dalam evaluasi PKM yaitu sesuai grafik di bawah:



**Grafik 3: Nilai Kepuasan Siswa**

grafik di atas menunjukkan rata-rata siswa menilai mereka mendapatkan manfaat dengan memberikan nilai di *range* antara 4,7 – 4,8 dengan skala 5. Dengan demikian, program ini telah memenuhikriteria aspek ketepatan manfaat.

**5. Aspek Partisipasi Siswa**

Aspek dievaluasi dari ada tidaknya partisipasi masyarakat dalam program pengabdian. Penerapan Metode *Student Active Learning* adalah metode yang tepat diberikan dalam kegiatan PKM ini karena mereka dapat melakukan komunikasi 2 arah kepada para dosen dan aktif dalam grup sehingga dapat menyelesaikan beberapa tugas *games* yang diberikan oleh para dosen dimana *reward*/penghargaan diberikan kepada grup yang aktif dalam kegiatan PKM ini. Dengan demikian, pada aspek ini, program pengabdian masyarakat telah memenuhi kriteria.

**6. Aspek Rencana Tinjauan Dampak**

Pada aspek ini, Tim dosen PKM memonitor sejauh mana siswa dapat memahami materi Pendidikan Antikorupsi dengan membimbing di masing-masing grup diskusi siswa. Dengan demikian dilihat dari aspek rencana tinjauan dampak, program pengabdian ini dapat dikatakan telah memenuhi kriteria.

**PENUTUP**

Setelah melaksanakan program pengabdian masyarakat yang bertemakan Pendidikan Antikorupsi kepada siswa SMK Perguruan Rakyat, maka dapat kami ambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Para siswa sangat berantusias dalam mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan aksi korupsi dalam lingkup kehidupan sehari-hari.
- 2) Setelah mendapatkan paparan materi Pendidikan Antikorupsi, para siswa menunjukkan sikap yang mencerminkan bahwa mereka lebih memahami lagi mengenai bahaya, dampak dan penanggulangan dari sikap korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini tercermin dalam jawaban kritis mereka ketika mereka diminta untuk analisa terhadap suatu kasus yang berkenaan dengan perilaku korupsi.



- 3) Pendidikan Antikorupsi baiknya diberikan sejak masih dini terutama di level Pendidikan formal seperti sekolah agar para siswa lebih dapat meningkatkan kepedulian dan kemawasan diri akan perilaku korupsi itu sendiri, sehingga sikap negatif seperti ini dapat dihindari dan diminimalisir perkembangannya terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### REFERENSI

- Dwiputri, I. N., Putri, R. D., Mintarti, S. U., Rachmawati, D., & Megasari, R. (2020). Program Pendidikan Antikorupsi pada Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 186–190. <https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5407>
- Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi*, 6(1), 31–45. <https://doi.org/10.32697/integritasv6i1.621>
- Manurung, R. T. (2012). PENYERAPAN LEKSIKON ASING DALAM BIDANG OTOMOTIF ahsan ainur ridwan. *Jurnal Sositologi*, 27(11), 232–240. [https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=antikorupsi+adalah&hl=id&as\\_sdt=0,5#:~:text=Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik](https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=antikorupsi+adalah&hl=id&as_sdt=0,5#:~:text=Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik)
- Raras Ramadhani. (2022). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tambun Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 105(4), 4. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/buku-pendidikan-antikorupsi-untuk-perguruan-tinggi>
- <https://cms.kpk.go.id/storage/2688/Laporan-Tahunan-KPK-2021.pdf>
- <https://koran-jakarta.com/>
- <https://data.tempo.co/data/1208/>
- <https://aziikkk.wordpress.com/2017/11/18/>
- <https://dataindonesia.id/>

